

Izin Dibuka, Pariwisata Bali Kembali Bergairah

DENPASAR (IM) - Surat edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2021 yang ditandatangani pada Selasa sore (7/9), sangat berdampak bagi pariwisata Bali terutama pariwisata di alam, desa wisata dan pantai.

Dalam SE tersebut dinyatakan pariwisata di Bali terutama destinasi alam terbuka, agrowisata, pantai, sudah bisa dibuka. SE ini disambut gembira oleh para pelaku pariwisata di Bali. Bahkan, bukan hanya destinasi wisata, mal, supermarket, restoran dan warung sudah bisa dibuka hingga pukul 21.00 WITA. Namun, syarat dan ketentuan tetap berlaku seperti pelaksanaan Prokes secara ketat, divaksin dua kali, wajib mengisi aplikasi peduliLindungi dan seterusnya.

Dari pantauan Rabu (8/9) di beberapa destinasi di Bali mulai mempersiapkan segala sesuatu. Terutama bagi pedagang kecil seperti warung, penjual makanan, konter souvenir dan sebagainya. "Asal dibuka saja, kita sudah

senang sekalipun terbatas. Kami optimis pasti ada saja orang yang datang ke pantai, ada yang main ke pantai dan pasti ada yang makan, minum dan seterusnya. Sekalipun pelan-pelan kami bisa dapatkan pemasukan. Kami janji akan taat Prokes. Ini demi kesehatan kami juga," ujar Nyoman Wastini, pemilik warung di kawasan Pantai Lejjan, Kita Bali, Rabu (8/9).

Suasana Kota Denpasar dan sekitarnya tampak lebih ramai dari sebelumnya. Beberapa ruas jalan utama mulai macet dan antri. Beberapa destinasi juga tampak lebih ramai dari sebelumnya.

Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali (APPMB), Wayan Puspandana mengaku sangat apresiasi terhadap SE Gubernur Bali yang mulai membuka pariwisata Bali. "Pak Gubernur mulai make sense atas kondisi masyarakat di destinasi wisata yang telah sekarat. Meski terlambat, ada secercah harapan untuk mendenyutkan dan mulai membangkitkan pariwisata," ujarnya. ● **pra**

Sekda Bandung Ancam Tutup Sekolah yang Langgar Prokes Saat PTM

BANDUNG (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengklaim pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di 330 sekolah berjalan lancar. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, maka tidak segan sekolah dilarang untuk beroperasi.

"Kami hari ini ada 2 yang kami tinjau yakni PGII dan di sekolah dasar Ar Rafi. Alhamdulillah baik di PGII baik di Ar Rafi, ini yang mengembirakan kita semuanya ternyata sudah paham dengan katanal aturan main di dalam pelaksanaan PTM," ujar Sekda Kota Bandung, Erna Sumarna saat meninjau SD Ar Rafi, Rabu (8/9).

Dia menuturkan, sekolah sudah menerapkan kapasitas minimal antara 20 hingga 50 persen serta menyiapkan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan. Para pengelola sekolah pun dinilai sudah lancar dalam melaksanakan protokol kesehatan. "Siswa juga diatur sedemikian rupa dan tadi membuktikan bahwa di sini pun (SD Ar Rafi) memang belum 100 persen," ungkapnya.

Erna mengatakan, sekolah harus melayani siswa yang belum diizinkan untuk belajar

tatap muka. Pihaknya juga akan menerjunkan tiap dinas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PTM.

Dia menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran di sekolah maka pihaknya akan memberikan peringatan. Namun, apabila tetap membandal akan diminta untuk tidak beroperasi kembali.

"Yang paling utama adalah komitmen dan disiplin dari satgas di sini ya. Jangan hanya karena diawasi menjadi benar, tidak diawasi abai. Karena sekali nanti ditemukan ada kesalahan-kesalahan melanggar, ya mungkin pertama diperingati kedua tidak ada peringatan 2 atau 3 langsung kita eksekusi dengan kebijakan sekolah itu kembali ditutup tidak boleh untuk melaksanakan PTM," katanya.

Erna menegaskan pelaksanaan PTM di dua sekolah yang ditinjau berjalan dengan baik. Para pengelola sekolah sudah memahami peraturan tentang pelaksanaan PTM.

"Kalau menurut saya sangat luar biasa, sangat bagus mereka sesuai dengan apa yang sudah digarisakan dalam regulasi itu yang membahagiakan kita juga," katanya. ● **pur**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

SEKOLAH TATAP MUKA TERBATAS DI BANDUNG

Guru mengajar kepada murid secara daring saat hari pertama pembelajaran tatap muka terbatas di SD Ar Rafi, Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/9). Pemerintah Kota Bandung mengizinkan sedikitnya 330 sekolah untuk memulai pembelajaran secara tatap muka dengan membatasi kapasitas maksimum 50 persen di setiap ruang kelas serta penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Petani Milenial Minta Ade Yasin Jadikan Pertanian untuk Pemulihan Ekonomi

Ketua Himpunan Petani dan Peternak Milenial Indonesia, Aldi Supriyadi mengapresiasi pemerintah dan DPRD Kabupaten Bogor yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp520 miliar untuk sektor pemulihan ekonomi di tahun 2022.

CIBINONG (IM) - Ketua Himpunan Petani dan Peternak Milenial Indonesia, Aldi Supriyadi meminta Pemkab Bogor menjadikan sektor pertanian dan peternakan sebagai prioritas pemulihan ekonomi. Menurut mantan Ketua Pokja wartawan DPRD Kabupaten Bogor ini, untuk mendorong sektor tersebut, maka diperlukan intervensi pemerintah daerah.

"Harapan kami agar ang-

garan pemulihan ekonomi digunakan untuk membangun infrastruktur pertanian, asuransi produk pertanian, dan juga penanganan pasca panen komoditas pertanian," kata Aldi kepada wartawan, Rabu (8/9).

Dalam kesempatan ini, ia mengapresiasi pemerintah dan DPRD yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp520 miliar untuk sektor pemulihan ekonomi di tahun 2022.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp392 miliar digunakan untuk program membangun infrastruktur desa yang bernama satu miliar satu desa (Samsisade).

"Potensi perdesaan adalah pertanian karena itu anggaran Samsisade mestinya untuk menggerakkan sektor ekonomi di bidang pertanian, perikanan, peternakan hingga pariwisata," sambungnya.

Aldi menuturkan sektor pertanian, perikanan dan peternakan masih tumbuh positif di tengah hantaman pandemi Covid-19. Pada akhir 2020, kontribusi pertanian terhadap produk domestik bruto Kabupaten Bogor sebesar Rp12,73 triliun atau 5,39 persen dari total PDRB tahun 2020 sebesar Rp236,15 triliun.

Kontribusi tersebut masih tumbuh positif dibanding 2019 sebesar Rp12,47 triliun

atau 5,26 persen dari total produk domestik bruto

Namun, katanya, pertumbuhan positif sektor pertanian masih belum memberikan dampak positif terhadap pendapatan petani.

Hal itu karena biaya produksi yang mahal serta harga berbagai komoditas yang fluktuatif menjadikan petani seringkali mengalami kerugian.

"Karena itu pemerintah dari pusat hingga daerah harus intervensi kebijakan dan juga anggaran yang memprioritaskan pemulihan ekonomi sektor pertanian, perikanan dan peternakan," tutur Aldi.

Pimpinan Usaha BogorOnline ini juga menyoroti tentang regenerasi petani. Menurutnya dari sektor pertanian hanya menyerap 3,91 persen dari jumlah angkatan kerja yang memiliki pekerjaan.

"Yang memilih sektor pertanian jumlahnya sangat sedikit yakni hanya 3,91 persen atau sebanyak 91.672 orang. Artinya bisnis pertanian kita belum menarik minat kaum Milenial," lanjutnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut jumlah angkatan kerja pada 2020 sebesar 2.342.939 angkatan kerja yang memiliki pekerjaan. Dari jumlah itu sebanyak 1.073.315 orang atau 45,81 persen bekerja sebagai buruh,

karyawan atau pegawai.

Sementara yang memilih wirausaha sebanyak 592.089 orang atau 25,27 persen dari total angkatan kerja yang tereserap. Adapun yang memilih sektor pertanian jumlahnya sangat sedikit yakni hanya 3,91 persen atau sebanyak 91.672 orang.

Di tempat yang sama, Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan, upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani salah satunya dengan gerakan beli beras petani lokal.

Dia bahkan telah meminta seluruh ASN membeli beras Carita Makmur sebesar 5kg per bulan yang merupakan beras dari petani di Kecamatan Sukamakmur.

"Tahun 2020 ASN membeli sebanyak 847,5 ton dengan harga yang membuat petani tersenyum, untuk tahun ini kami menargetkan beli beras petani sebanyak 850 ton," ujar Ade.

Program di sektor pertanian lainnya adalah menerbitkan Kartu Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Program tersebut sudah berjalan dan pada 2020 realisasi 2.020 hektar sawah petani telah diasuransikan. Sementara pemerintah daerah menargetkan sebanyak 5 ribu hektar pada 2021. ● **gio**

Walhi: Alih Fungsi Lahan di Gunung Salak Jadi Penyebab Banjir Bandang di Kab. Bogor

BOGOR (IM) - Masalah tata ruang di Kabupaten Bogor, terutama pembangunan permukiman di sekitar wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogor Barat dan Bogor Selatan, dinilai menjadi pemicu banjir bandang di kawasan itu.

Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, Meiki Paedong menjelaskan banjir bandang di wilayah Bogor Barat tak sepenuhnya disebabkan oleh intensitas hujan deras sehingga debit air Sungai Cidurian meluap.

Menurutnya, kerusakan lingkungan di sekitar Bogor, terutama di bagian hulu yakni Gunung Salak, sedikitnya berkontribusi menyebabkan banjir bandang.

"Ada kontribusi mikro akibat dampak dari alih fungsi lahan di kawasan hulu, tata ruang yang tidak terukur, dan tumbuhnya kawasan permukiman di daerah resapan sungai," kata Meiki saat dihubungi, Rabu (8/9).

Menurut pengamatan Walhi, alih fungsi lahan terbuka hijau di sekitar Gunung Salak menyebabkan daerah resapan air berkurang. Kondisi itu diperparah dengan bertambah banyaknya pembangunan permukiman penduduk, rumah tinggal sementara seperti hotel atau vila, hingga penambangan emas ilegal di sekitar Gunung Salak.

Berkurangnya daerah resapan air di hulu tersebut tentunya berdampak pada bagian hilir. Di samping itu, pada bagian hilir, pemerintah juga tak menyoroti pembangunan tata ruang kota sehingga daerah aliran sungai dibiarkan dijadikan pemukiman penduduk.

Padahal, kata Meiki, DAS harusnya menjadi daerah terbuka hijau. DAS ini juga bisa menjadi daerah resapan air yang akan membantu jika sungai tak lagi bisa menahan debit air hujan.

"Jadi banyak tumbuh kawasan permukiman di badan sungai yang seharusnya secara ekologis dia buffer, tidak dimukimi, tidak ada tempat tinggal. Itu kan masuk kategori kerusakan lingkungan selain karena kontribusi sedikit banyak diakibatkan karena kerusakan juga di bagian hulu," jelas Meiki.

Meiki pun mendorong perbaikan tata ruang kota di Kabupaten dan Kota Bogor, sekaligus mengkaji kembali izin pembangunan atau alih fungsi lahan terbuka hijau di sekitar Gunung Salak.

"Perbaikan tata ruang kota itu perlu sebagai proses mitigasi. Ke depan kawasan hulu ini juga harus ada perbaikan dari aspek kebijakan, pembatasan izin alih fungsi lahan, lebih diutamakan lagi jadi satu zona lindung yang punya kemampuan menyerap air hujan," tuturnya.

Sebelumnya, banjir bandang melanda Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin (6/9) petang. BMKG menyebut penyebab banjir akibat hujan intensitas tinggi hingga Sungai Cidurian meluap. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Peristiwa serupa juga pernah terjadi pada Januari 2020. Banjir disertai tanah longsor yang disebut akibat luapan Sungai Cidurian itu memakan 8 korban jiwa. Bencana banjir juga beberapa kali terjadi di Bogor saat intensitas hujan tinggi. ● **pur**



IDN/ANTARA

WADAH PEMASARAN PRODUK UMKM DI BANDUNG Seorang pengunjung memilih pakaian di wadah pemasaran produk UMKM yang diberi nama Salapak di Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/9). Pemerintah Kota Bandung menghadirkan sarana layanan pemasaran produk UMKM di Kota Bandung yang telah diisi oleh 80 produk unggulan fesyen, kuliner dan kerajinan dari 60 tenan guna memfasilitasi para pengusaha di masa pandemi.

1.471 SMA di Jawa Barat Mulai Pembelajaran Tatap Muka

BANDUNG (IM) - Ribuan sekolah tingkat menengah atas di Jawa Barat memulai pembelajaran tatap muka perdana semenjak terjadi pandemi Covid-19. Di sisi lain, program vaksinasi untuk guru yang bertugas di tingkat sekolah menengah atas terus berjalan.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi Supandi melakukan pemantauan ke beberapa sekolah. Di antaranya SMKN 13 Bandung dan SMKN 9 Bandung. Hal yang disorotinya adalah infrastruktur protokol kesehatan dan mekanisme pembelajaran terbatas yang diberlakukan.

Pada tahap pertama ini, hanya 25 persen anak yang masuk sekolah dengan sistem shif. Sisanya masih menjalankan pola pembelajaran jarak jauh (PJJ) sambil menunggu giliran untuk pembelajaran tatap muka.

"Shif misalnya, mereka melakukan seperti di teman SMA masuk jam 07.00 WIB, keluar jam 10.30, nanti setelah itu melakukan penyemprotan disinfektan, nanti yang shif siangnya jam 13.00 sudah disemprot yang shif siang," kata Dedi, Rabu (8/9).

Dari total 4.966 sekolah

tingkat menengah di Jawa Barat, jumlah yang menggelar pembelajaran langsung pada tahap pertama ada 1.471 sekolah.

Terkait pengawasan yang dilakukan oleh pihak sekolah, Dedi menegaskan pihak satuan pendidikan harus reaktif saat mendapatkan satu kasus Covid-19 dengan cara melaporkannya ke puskesmas setempat, sekaligus menutup aktivitas pembelajaran tatap muka di sekolah sementara waktu. Penutupan sementara pun bergantung pada level keparahan Covid-19 di kabupaten kota. "Kalau naik level lagi, maka hentikan sementara sesuai aturan di tanggal PPKM tersebut, tapi setelah selesai itu berlaku kembali," ujarnya.

Disinggung mengenai vaksinasi siswa, ia menyatakan bahwa hal tersebut terus berjalan secara paralel. Untuk vaksinasi guru, saat ini secara kuantitas lebih banyak menyangkut yang bertugas di sekolah menengah pertama.

"Hanya sekolah saat ini baru mencapai 28 persen untuk SMA, pelajar level 12 tahun SMP sudah mencapai 63 persen, kalau tak salah. Bulan September Oktober ini terus fokus naik," tutup Dedi. ● **pur**

Pemkot Bogor Pulangkan Aset Negara 1,43 Juta Meter Lahan

BOGOR (IM) - Pemerintah Kota Bogor terus berupaya mengembalikan aset milik negara yang menjadi hak pemerintah. Sejak awal tahun hingga bulan Juli 2021 kemarin, ada seluas 1.430.881 meter persegi atau sekitar 716 bidang tanah milik Pemkot Bogor dan pemerintah berhasil dikembalikan.

Terbaru, ada penyerahan sertifikat hak atas tanah aset Pemkot Bogor dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bogor pada Selasa (7/9).

Penyerahan dihadiri langsung Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Deni Hendana dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Denny Mulyadi.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, mengatakan, sejauh ini Kantah Kota Bogor selalu mendukung program-program yang ada di Kota Bogor. Ia menilai capaiannya luar biasa, salah satunya adalah sudah berhasil mendigitalisasi

dan memetakan seluruh bidang tanah di Kota Bogor.

Inilah Koran Tag

"Kota Bogor yang sudah ada sejak zaman kemerdekaan, nilai asetnya hanya Rp 8 triliun. Makanya digitalisasi menjadi target utama kami, seluruh aset Kota Bogor yang saat ini ada sekitar 3.850 bidang. Dengan digitalisasi saya optimis bisa lebih dari 5.000-an bidang," ungkap Dedie saat dihubungi, Rabu (8/9).

Dedie melanjutkan, perlu adanya inventarisasi dan evaluasi kembali atas aset yang dimiliki oleh Pemkot Bogor. Tak hanya aset berupa jalan, namun juga aset lainnya seperti prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

"Dengan penambahan aset milik Kota Bogor itu pula, akan berimplikasi kepada pendapatan daerah. Sehingga bisa menambah kas daerah untuk keperluan percepatan pembangunan," tuturnya.

"Ya, memang ini tantangan kami ke depan, bahwa pendapatan dari BPHTB Kota

Bogor itu mencapai setengah triliun. Jadi memang harapan kami yang paling mudah itu adalah mendorong BPHTB dan PBB-P2," tambah Dedie.

Dedie menjelaskan, fakta lain menunjukkan, adalah tentang batas wilayah perkotaan. Bahwasanya, masih banyak wilayah yang belum memiliki tata batas wilayah yang jelas. Selain itu juga untuk mempersiapkan moratorium pemekaran wilayah secara nasional.

"Untuk itu, hal-hal tersebut harus dituntaskan secara maksimal dan secepat mungkin," jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Rahmat menambahkan, Kota Bogor memang dikenal sebagai kota yang padat. Sehingga sebenarnya, Kota Bogor memiliki potensi yang cukup besar.

"Untuk itu kami harus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan Kota Bogor. Dari Kota Bogor, banyak yang bisa kami andalkan," pungkask Rahmat. ● **gio**



IDN/ANTARA

GEBYAR VAKSINASI JABAR JUARA

Petugas menyuntikkan vaksin kepada warga yang mengikuti Gebyar Vaksinasi Jabar Juara di Indramayu, Jawa Barat, Rabu (8/9). Pemprov Jabar menargetkan 37 juta warga Jawa Barat tervaksinasi Covid-19 hingga Desember mendatang untuk mencapai kekebalan Komunal (Herd Immunity).